

Laporan Akhir

Indeks Toleransi

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjukNya, Penyusunan "Laporan Penelitian Indeks Toleransi 2022" telah dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi toleransi di Kabupaten Lombok Tengah dengan mempertimbangkan aspek dimensi persepsi, dimensi sikap, dimensi kerjasama dan dimensi sikap pemerintah.

Hal-hal yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil olah data jawaban responden dari kuesioner yang telah disebar di seluruh kecamatan dan dihimpun oleh para enumerator. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Stakeholders lainnya dalam penyusunan perencanaan, kebijakan dan pengambilan keputusan serta dapat pula digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan.

Penyusunan laporan penelitian indeks toleransi 2022 ini telah diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun bila terdapat kekurangan dan keterbatasan, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan penyempurnaan pada masa-masa yang akan datang.

Praya, Oktober 2022

Kepala Bappeda
Kabupaten Lombok Tengah,



LALU WIRANATA, SIP, MA
NIP. 197611282005011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Profil Kabupaten Lombok Tengah	3
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
4. Kerangka Konseptual	5
a. Variabel Norma dan Ajaran	7
b. Variabel Pemahaman	8
c. Variabel Sikap	8
d. Variabel Persepsi	8
5. Output Penelitian	11
6. Jadwal Penelitian	12
BAB II DESAIN KEGIATAN	13
1. Frekuensi Kegiatan	13
2. Jenis Data	13
Metode Pengumpulan Data	13
Cakupan Wilayah Data	15
Metode Penentuan Responden	15
Metode Pengolahan dan Analisa Data	16
BAB III PENGUMPULAN DATA	18
1. Jenis Petugas	18
Persyaratan Pendidikan Terakhir Petugas	18
Jumlah Petugas	18
Pelatihan Petugas	18
BAB IV PROSES PENGOLAHAN, METODE ANALISIS DAN DESIMINASI DATA	19
1. Proses Pengolahan Kompilasi	19
2. Metode Analisis	19
3. Unit Analisis	20
4. Level Penyajian	20
5. Produk Data yang Disediakan untuk Umum	20
6. Persepsi Tentang Toleransi	21
7. Sikap Tentang Toleransi	24
8. Kerja Sama Hubungan Sosial antar Umat Beragama	26
9. Sikap Pemerintah	28
10. Indeks Dimensi Toleransi	31
11. Deskriptif Identitas Responden	36
BAB V PENUTUP	40
1. Kesimpulan	40
2. Rekomendasi	41

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	iii
1. Tabel 1. Persepsi Responden Terhadap Toleransi	22
2. Tabel 2. Sikap Responden Terhadap Toleransi	25
3. Tabel 3. Kerjasama Antar Umat Beragama	27
4. Tabel 4. Sikap Pemerintah Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama	28
5. Tabel 5. Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Persepsi	31
6. Tabel 6. Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Sikap	32
7. Tabel 7. Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Kerja Sama	33
8. Tabel 8. Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Sikap Pemerintah	34
9. Tabel 9. Capaian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 – 2022	36
10. Tabel 10. Nilai Korelasi Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Toleransi	37
11. Tabel 11. Nilai Korelasi Usia Terhadap Indeks Toleransi	38
12. Tabel 12. Nilai Korelasi Jenis Kelamin Terhadap Indeks Toleransi	39

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	iv
1. Gambar 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	4
2. Gambar 2. Grafik Responden Dimensi Presepsi.....	32
3. Gambar 3. Grafik Responden Dimensi Sikap	33
4. Gambar 4. Grafik Responden Dimensi Kerjasama – Hub Sosial	34
5. Gambar 5. Grafik Responden Dimesi Sikap Pemerintah.....	36
6. Gambar 6. Grafik Pendidikan responden	33
7. Gambar 7. Grafik Kelompok Usia responden.....	37
8. Gambar 8. Grafik Kelompok Usia berdasarkan Jenis Kelamin responden	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, dengan adanya perbedaan Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam kehidupan beragama. Kerukunan beragama merupakan keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi dengan nilai toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam ajaran agama serta Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.

Peningkatan kerukunan umat beragama masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu pengelolaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial belum optimal. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama baru menyentuh sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Permasalahan mendasar lainnya adalah Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik.

Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan hidup umat beragama adalah meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun

sehingga tercipta pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lain- lain). Berbagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama tersebut di atas telah melahirkan wawasan keagamaan yang seimbang, moderat, inklusif dan menghargai perbedaan di kalangan umat beragama.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama masih dihadapkan pada permasalahan belum terpenuhinya standar pelayanan keagamaan dan kesenjangan pelayanan keagamaan antar wilayah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas dan penguatan lembaga sosial keagamaan dengan dukungan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Profil Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' lintang Selatan, luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 ha). dengan batas-batas sebagai berikut:

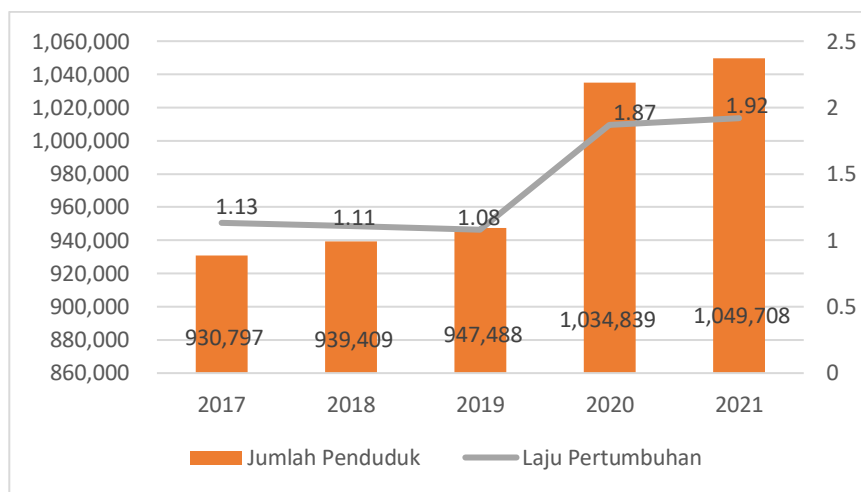
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 12 kecamatan antara lain: Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Janapria, Kopang, Praya, Praya Tengah, Jonggat, Pringgarata, Batukliang, dan Batukliang Utara. Dengan jumlah desa 127 dan Kelurahan 12.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 berjumlah 1.034.859 jiwa dan kini pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat sebesar 1.049.708 Jiwa . Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,8%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren meningkat. Di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% dan naik di tahun 2020 menjadi 1,8%. Terjadi peningkatan pada laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 menjadi 1.92% Adanya lonjakan peningkatan pada jumlah penduduk ini secara statistik disebabkan karena adanya perapihan data kependudukan setelah Sensus Penduduk 2020 oleh

BPS. Pada Gambar dibawah disajikan grafik yang menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020.

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2016-2020 masih didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun. Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui gambar piramida penduduk Lombok Tengah yang termasuk piramida stasioner seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Besarnya jumlah populasi penduduk usia produktif ini merupakan bonus demografi yang diprediksi akan terus diterima hingga tahun 2030.



Gambar 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2022 (data diolah)

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian secara umum adalah untuk mengukur pencapaian misi pertama Kabupaten Lombok Tengah yaitu merawat akhlaqul dalam bermasyarakat melalui Indeks Toleransi. Adapun tujuan khususnya antara lain :

- Menemukan nilai indeks toleransi di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengidentifikasi faktor berpengaruh terhadap toleransi di Kabupaten Lombok Tengah;
- Menawarkan model kebijakan penguatan toleransi yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun manfaat dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang kondisi social budaya di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama.

4. Kerangka Konseptual

Studi tentang toleransi telah banyak dilakukan, salahsatunya yang lazim digunakan sebagai model penelitian kuantitatif tentang toleransi adalah yang dilakukan oleh Bogardus pada tahun 1925. Studi ini kemudian direplikasi pada tahun 1946, 1956, 1966, dan 2005. Fokus kajiannya adalah pada pengukuran sejauh mana penerimaan seseorang terhadap orang lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya. Konsep Bogardus ini kemudian populer dengan sebutan Social Distance Scale yang kemudian banyak digunakan sebagai alat ukur toleransi sosial. Bogardus mendefinisikan jarak sosial (social distance) sebagai *function of affective distance between the members of two groups: in social distance studies the center of attention is on the feeling reactions of persons toward other persons and toward groups of people* (Bogardus, 1947). Dalam konsep ini, jarak sosial pada dasarnya diukur dari seberapa besar simpati yang dirasakan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya.

Konsep Bogardus (1947) tidak secara khusus membahas tentang toleransi sosial ataupun toleransi antarumat beragama. Terdapat beberapa kelemahan ketika hal tersebut dipakai untuk melihat keintiman atau kedekatan hubungan sosial antara pemeluk yang berbeda agama di suatu negara. Tingkatan hubungan yang dikonsepsikan Bogardus tidak selamanya bisa dilihat berjenjang seperti itu, mengingat dua variabel jenjang yang ada, misalnya, bisa saja memperlihatkan keintiman atau jarak sosial yang sama dalam praktek kehidupan masyarakat. Selain

itu, terdapat juga variabel antara (*intervening variables*) yang ikut berpengaruh terhadap pilihan hubungan yang dilakukan seseorang.

Definisi toleransi beragama (*religious tolerance*) tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran. Powell dan Clarke (2002) menyatakan bahwa *an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place*. Dalam pernyataan tersebut, tersirat bahwa toleransi adalah pengecualian (exception) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Definisi lain dikemukakan oleh Andrew Cohen (2004: 69), yang menyatakan bahwa *an act of toleration is an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behaviour, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere*. Dalam definisi tersebut, toleransi diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya.

Dalam konteks hubungan antarumat beragama, intoleransi muncul ketika ada prasangka terhadap orang atau kelompok lain yang berada di luar dirinya. Gordon Allport (1954) menyebutkan tentang paradoks agama dan intoleransi. Menurutnya, agama turut bertanggung jawab atas munculnya prasangka. Kendati ada aspek universal dari setiap agama, tapi ketika ikatan-ikatan keagamaan itu terbentuk, maka perasaan in group akan muncul dan menyebabkan setiap orang yang berada di luar ikatan tersebut dianggap sebagai out group dan diperlakukan berbeda, bahkan tidak jarang dicurigai akan mengganggu ketahanan ikatan tersebut. Dalam konteks inilah, konflik dan perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi rentan muncul.

Konflik keagamaan yang diawali oleh keadaan yang tidak rukun antarpemeluk agama yang berbeda muncul karena adanya beberapa faktor penyebab.

Ahmad (2013) menjelaskan keterkaitan berbagai faktor ini dengan konflik atau keadaan tidak rukun ke dalam variabel-variabel berikut:

a. Variabel Norma dan Ajaran.

Ajaran yang ada yang mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang Muslim berasal dari alQuran dan hadits (mungkin juga ijma). Ajaran ini diinterpretasi dan diinternalisasi. Karena ajaran yang ada sangat bersifat umum, hal ini memungkinkan munculnya berbagai interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat Muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda, di samping pengalaman, pendidikan dan tingkatan ekonomi yang juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini muncullah apa yang diidealkan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam (*baladatun thoyyibatun wa robbun ghofur*). Termasuk dalam hal ini adalah pengakuan bahwa interpretasinya adalah yang paling benar, sehingga menafikan interpretasi kalangan lain, seperti terlihat dalam gerakan purifikasi. Dalam agama lain, hal seperti ini juga bisa terjadi, dengan situasi dan faktor penyebab yang mungkin sama.

b. Variabel Pemahaman.

Pemahaman adalah kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran. Dalam kasus masyarakat Islam diasumsikan bahwa di sana ada beberapa paham umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Pemahaman ini merupakan penerapan manhaj tertentu dalam menafsirkan teks al Quran maupun hadits. Karena pemahaman bisa berbeda, tindakan atau sikap dalam hubungannya dengan agama lain juga bisa berbeda. Variabel pemahaman ini bisa saja diwarnai oleh perbedaan yang mencolok antara satu daerah dari daerah lainnya.

c. Variabel Sikap.

Variabel ini muncul ketika variabel kedua dihadapkan dengan kondisi sosial nyata dalam masyarakat. Hal ini termasuk didalamnya adalah faktor- faktor domestik dan internasional. Hegemoni politik oleh negara atau represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respon yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Meskipun demikian, sejauh ancaman hegemoni tadi menyangkut kedirian Islam sebagai agama atau umat Islam sebagai masyarakat, maka respon kalangan Islam akan sama, karena mereka juga terikat oleh ajaran bahwa "sebagai sesama umat Islam, mereka adalah bersaudara".

d. Variabel Persepsi.

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antar pemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadidalam interaksi antar elemen masyarakatdan kulturenya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan kerukunan (Turner, 1991: 234), yaitu 1) Teori nilai: kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling mentaati tatanan nilai-nilai

sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat. 2) Teori struktural: kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan. 3) Teori idealis: kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan. 4) Teori resiprositas: kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap. 5) Teori interaksi: kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antar kelompok, etnis, agama dll dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Secara teoritis sikap dan juga tindakan seseorang sangat dipengaruhi baik oleh nilai yang hidup dalam diri orang bersangkutan atau yang hidup dalam masyarakat yang mengelilinginya. Nilai itu selain berasal dari ciptaan manusia – sebagai produk kebudayaan juga bisa berasal dari ajaran- ajaran agama yang dalam kehidupan masyarakat beragama bisa saja merupakan faktor dominan. Tanpa menyederhanakan permasalahan yang ada, nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakatlah yang memengaruhi anggota masyarakat untuk bersikap dan bahkan mendorong tindakan- tindakan tertentu, sehingga dalam hal ini nilai dan norma tersebut, termasuk juga pandangan hidup (world view), merupakan faktor dominan yang mengarahkan baik itu sikap, pandangan maupun persepsi manusia yang dalam kasus penelitian ini terhadap kelompok lainnya.

Meskipun demikian, sikap sosial seorang pemeluk agama atau bahkan tindakan-tindakan tertentu bisa merupakan respon terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama lain atau terhadap kondisi kehidupan

yang diciptakan oleh pemeluk agama lain tersebut. Meskipun ajaran bisa saja berpengaruh terhadap sikap seorang pemeluk suatu agama, unsur sosial atau kondisi sosial politik biasanya lebih mendorong dalam memunculkan sikap dalam kaitannya dengan pemeluk agama lain tersebut.

Penelitian ini memahami toleransi dalam hubungan antar umat beragama sebagai masalah kerukunan antar umat beragama. Karena itu, variabel toleransi kemudian dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) indikator, yakni persepsi, sikap, kerjasama, dan sikap pemerintah. Persepsi, yakni aspek kehidupan yang masuk dalam wilayah penilaian para pemeluk agama dalam kaitannya dengan pemeluk agama lainnya. Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau world view yang dimiliki oleh para pemeluk agama bersangkutan. Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Sikap yang dimaksud di sini bisa berupa tindakan, tetapi bisa juga berupa tindakan "diam". Tetapi dalam penelitian ini sikap akan diungkapkan melalui pernyataan- pernyataan. Kerjasama, yakni aspek hubungan sosial antara para pemeluk agama yang berbeda. Persepsi atau penilaian selain bisa mendorong lahirnya sikap juga bisa melahirkan tindakan-tindakan kerjasama. Jadi kalau sikap lebih merupakan tindakan ke dalam dalam artian belum melahirkan tindakan nyata berkaitan dengan hubungan mereka dengan pemeluk agama lain, kerjasama adalah realitas hubungan sosial. Kerjasama dalam hal ini bisa diperlihatkan, misalnya, dalam tindakan gotong royong untuk kepentingan bersama atau saling menolong.

5. Output Penelitian

- Indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
- Rekomendasi sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan indeks toleransi.

6. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan, dari bulan Agustus s/d Oktober 2022, yang tersebar di 12 (Dua Belas) kecamatan dengan jumlah responden sebanyak 800 yaitu:

5202060 Kecamatan Praya	: 66
5202061 Kecamatan Praya Tengah	: 67
5202010 Kecamatan Praya Barat	: 67
5202011 Kecamatan Praya Barat Daya	: 67
5202030 Kecamatan Praya Timur	: 67
5202020 Kecamatan Pujut	: 67
5202050 Kecamatan Kopang	: 67
5202040 Kecamatan Janapria	: 67
5202090 Kecamatan Batukliang	: 66
5202091 Kecamatan Batukliang Utara	: 66
5202080 Kecamatan Pringgarata	: 67
5202070 Kecamatan Jonggat	: 66

Jadwal Pelaksanaan Survei

BAB II

DESAIN KEGIATAN

1. Frekuensi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh indeks toleransi yang akan digunakan sebagai indikator pencapaian misi pertama Kabupaten Lombok Tengah yaitu merawat akhlaqul dalam bermasyarakat melalui Indeks Toleransi yang merupakan salah satu target indikator RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan adalah data *Cross Section*, Dalam survei ini dikumpulkan 4 variabel yang saling berkaitan dalam kurun waktu satu tahun.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai toleransi antarumat beragama ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Dengan cara ini diharapkan bisa tergambarkan generalisasi pola hubungan antarumat beragama yang ada. Hubungan yang dimaksud berkaitan dengan tingkat keintiman (intimacy) atau bahkan sebaliknya kebencian yang menyertainya. Dengan kata lain, toleransi dalam hubungan antarumat beragama ini akan diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Selain mengukur jarak sosial yang mencerminkan toleransi umat beragama, penelitian ini juga menambahkan variabel sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antarumat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di

dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Keempat dimensi yang menjadi fokus survei ini, yaitu "persepsi", "sikap" "kerjasama", dan "sikap pemerintah", dijelaskan melalui beberapa indikator yang dirumuskan melalui item-item pertanyaan dalam kuesioner. Indikator yang memperlihatkan empat dimensi di atas diberi bobot, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam jawaban pada kuesioner, para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban, yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban tersebut diberi skor, yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Kelima jawaban yang ada tentu saja tidak memperlihatkan arti apa-apa bagi responden selain bahwa mereka diminta untuk memilih satu saja jawaban yang dirasa sesuai dengan pandangan, pendapat dan persepsi mereka. Skor jawaban tersebut mengindikasikan potensi kerukunan pada diri para responden. Pembobotan ini, yang tentunya hanya diketahui oleh para peneliti, dijadikan alat ukur berkaitan dengan tingkat kerukunan, di mana jawaban berbobot 5 adalah menunjuk pada tingkat kerukunan yang tinggi. Penomoran ini menjadi penting mengingat jawaban dalam kuesioner tidak berformat sama, melainkan tergantung pada pertanyaannya. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang memerlukan jawaban "sangat setuju" sampai "sangat tidak setuju", pembobotan jawaban seperti ini merujuk pada skala Likert yang lazim digunakan dalam penelitian survei. Pembobotan jawaban dalam skala Likert pada umumnya berjumlah ganjil: 3, 5, 7 dan seterusnya. Dalam penelitian ini ditetapkan 5 variasi, artinya 1 – 5, yang dianggap sudah cukup untuk mengakomodasi semua variasi jawaban yang diberikan para responden.

Survey dilakukan dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka dengan menggunakan instrument daftar pertanyaan (Kuisisioner).

Wawancara dilakukan oleh Petugas Pengumpul Data (Enumerator) yang telah dilatih sebelumnya untuk keperluan survey.

Adapun pengambilan sampel untuk survey ini dilakukan dengan cara *quota sampling*, yaitu :

- a. Tahap pertama adalah membagi jumlah sampel untuk 12 Kecamatan dengan cara memproporsikan jumlah sampel dengan jumlah penduduk di kecamatan. Pada tahap ini dihasilkan quota sampel untuk masing-masing kecamatan.
- b. Tahap kedua adalah membagi/memproporsikan jumlah sampel kecamatan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan di masing-masing kecamatan. Pada tahap ini dihasilkan quota sampel desa.
- c. Dari jumlah sampel per desa inilah petugas enumerator memilih responden dengan ketentuan usia 17 tahun ke atas dan sudah pernah menikah dengan memperhatikan gender dimana jumlah responden laki-laki seimbang dengan jumlah responden perempuan.

4. Cakupan Wilayah Data

Cakupan wilayah dalam survei ini adalah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Metode Penentuan Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap wilayah penelitian dilakukan dengan metode *multistage judgment sampling*. Jumlah responden sebanyak 801 orang dialokasikan kesetiap wilayah dengan menggunakan metode *multistage sampling* dengan membedakan karakteristik kecamatan dan selanjutnya secara individual dipilih dengan menggunakan teknik *accidental* bersyarat.

Adapun Syarat responden :

- ✓ Berusia minimal 17 tahun;
- ✓ Menetap minimal 5 tahun berturut-turut;
- ✓ Responden tidak berasal dari satu keluarga;
- ✓ Responden berasal dari 12 kecamatan;
- ✓ Masing-masing kecamatan minimal 5 desa/kelurahan;
- ✓ Masing-masing desa minimal 3 dusun/lingkungan;
- ✓ Responden terdiri dari 50% laki-laki dan 50% perempuan
- ✓ Identitas responden dibuktikan dengan foto KTP.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk dapat memperoleh indeks skor dari beberapa variabel yang menanyakan tentang (1) persepsi; (2) sikap; (3) kerjasama; dan (4) sikap terhadap pemerintah, yang masing-masing digabung menjadi variabel komposit. Karena jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dibobotkan dari yang tertinggi sampai yang terendah (1-5), Skor variabel komposit inilah yang digunakan sebagai barometer yang menunjukkan tingkatan toleransi dalam hubungan antarumat beragama.

Dengan menggunakan hasil penghitungan skor tersebut, disusun indeks penilaian dari setiap variabel dan indeks keseluruhan yang mencerminkan tingkat toleransi umat beragama. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah:

a. Menghitung indeks

$$\text{Indeks} = (\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$$

b. Menghitung jarak interval

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}) / 5 \\ &= (5-4) / 5 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Nilai Indeks:

$$1 - 1,7 = \text{Sangat rendah}$$

1.8 - 2.5	=	Rendah
2.6 - 3.3	=	Cukup
3.4 - 4.1	=	Tinggi
4.2 - 5	=	Sangat tinggi

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan nilai indeks. Dalam interpretasi tersebut, juga digunakan hasil pengolahan data secara deskriptif.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Petugas

Petugas lapangan serta supervisor dari survei ini terdiri dari staf, tenaga honorer dan mitra Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.

2. Persyaratan Pendidikan Terakhir Petugas

Persyaratan pendidikan petugas pengumpul data (enumerator) survei indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 minimal adalah SLTA atau sederajat.

3. Jumlah Petugas

Jumlah petugas pada survei indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang dengan rincian :

- a. Petugas Pengumpul Data (Enumerator) 20 orang
- b. Supervisor 4 orang
- c. Enumerator Desa 2 orang

4. Pelatihan Petugas

Sebelum petugas pengumpul data melakukan survei terlebih dahulu dilakukan pelatihan/pembekalan (briefing) tentang konsep definisi survei dan tata cara wawancara selama 8 jam pelajaran dengan metode tatap muka.

BAB IV

PROSES PENGOLAHAN, METODE ANALISIS DAN DESIMINASI DATA

1. Proses Pengolahan Kompilasi

a. Proses Verifikasi dan Cleaning Data.

Proses verifikasi dan cleaning data dilakukan pada tahap pemeriksaan oleh supervisor petugas lapangan. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan identitas dokumen serta kelengkapan isian dari seluruh item pertanyaan dalam survei.

b. Harmonisasi Konsep dan Defenisi unit/atau variable yang digunakan.

Tahapan harmonisasi konsep dan defenisi dilakukan juga saat supervisor melakukan verifikasi dan cleaning data. Tahap ini dilakukan di supervisor untuk mengurangi resiko *error entry* dan mempermudah konfirmasi ke petugas lapangan maupun responden.

c. Penyesuaian (standarnisasi) semua data/variable yang digunakan.

Tahapan ini dilakukan pada saat entry data oleh petugas entry.

d. Penggunaan kode referensi atau kode relasi untuk menautkan data-data yang digunakan.

Tahapan ini juga dilakukan saat petugas entry data melakukan input data di komputer.

2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana, seperti *mean*, *median*, *Modus*, *range*, *variance*, standar deviasi, tabel kontingensi, dan analisis kuadran.

Analisis desriptif digunakan karena indeks toleransi dihitung dengan menggabungkan variabel-variabel persepsi kerukunan dalam indeks komposit. Di samping itu metode sampling yang digunakan adalah non probability sampling sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan secara inferensia.

Metode analisis yang dipakai pada survei ini didasarkan pada survei sejenis yang dilaksanakan oleh kota Bandung pada tahun 2016 dan telah dimuat dalam jurnal Universitas Padjajaran tahun 2016.

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam survei ini adalah individu atau masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

4. Level Penyajian

Level penyajian dari survei ini adalah level kabupaten

5. Produk Data yang Disediakan untuk Umum

Hasil dari survei ini akan didiseminasikan dalam bentuk antara lain:

- a. Buku Publikasi Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022,
- b. Dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022,
- c. Didiseminasikan melalui website Bappeda kabupaten Lombok Tengah dan website Resmi Pemerintah kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022.

6. Persepsi tentang Toleransi

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antar pemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau world view yang dimiliki oleh para pemeluk agama bersangkutan. Persepsi ini diukur dari sejumlah hal, antara lain: pemenuhan hak-hak keberagamaan, pemenuhan kewajiban dalam hubungan antar umat beragama, penilaian terhadap keberagamaan, penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, serta konflik yang berpeluang terjadi atau pernah dialami oleh responden dalam interaksinya dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Hal ini tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Persepsi Responden Terhadap Toleransi

Persepsi	Jawaban (% dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	53.5	46.38	0.13	0	0
Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	47	52.50	0.38	0.13	0
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing masing	45.38	53	1.63	0	0
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing masing	41.25	56.38	2.13	0.25	0
Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	36.38	58.38	4.88	0.38	0
Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain	49.88	46.13	2.5	1.38	0.13
Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	27.38	43.75	16	6.75	6.13
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	43.75	51.25	4.63	0.38	0

Persepsi	Jawaban (% dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya	41.88	53.88	4	0.13	0.13
Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	51	45.63	2.63	0.75	0
Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat bergama	21.38	50	15.63	9.13	3.88
Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik	2.5	12.50	27.13	46.75	11.13
Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi	2.25	8.75	29.25	50.25	9.5
Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing masing pemeluk agama	5.63	18.25	26.25	36.38	13.5
Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	17.13	61.75	20.38	0.38	0.38
Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	23.75	64.63	10.88	0.38	0.38
Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	17.88	65.75	15.38	0.63	0.25
Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama	24.5	60.25	13.25	1.75	0.25

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan beribadah. Secara umum, persepsi responden terhadap toleransi cukup tinggi. Hal ini didukung oleh semua agama mengajarkan toleransi dan kerukunan sesuai syariat masing-masing. Mayoritas responden setuju bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi tidak berhubungan dengan masalah ekonomi dan politik namun hal tersebut cenderung disebabkan oleh persoalan pribadi atau individu yang bersangkutan. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa tokoh agama dan organisasi keagamaan memegang peran penting dalam mengayomi masyarakat khususnya terkait dengan penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang dianut.

7. Sikap tentang Toleransi

Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Dalam penelitian ini, sikap mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka relatif terbuka dalam berinteraksi sosial dengan umat yang berbeda agama. Hal ini tampak dari data berikut ini yang menggambarkan sikap responden dalam relasi sosial dengan umat beragama lain.

Tabel 2
Sikap Responden Terhadap Toleransi

Sikap	Jawaban (% Dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain	9	34.50	35.38	15.13	6
Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol dll) dengan pemeluk agama lain	13.88	49	31.50	4.75	0.88
Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain	14	40.75	38.25	6.25	0.75
Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain	17.50	49.88	26.88	4.38	1.38
Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya	2.25	16.38	27.88	34.38	19.13
Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatannya di lingkungan tempat tinggal saya	3	15.63	35.13	34.75	11.50
Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya	1.88	5.13	23.5	48.38	21.13
Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain	11.63	58.75	26	2.88	0.75
Saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan.	18.38	33.75	24.13	17.88	5.88
Keberadaan ajaran agama lain diluar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan	9	34.50	35.38	15.13	6

Responden bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden dengan jawaban setuju dengan frekuensi tinggi misalnya pada subvariabel Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol, dll) dengan pemeluk agama lain (66,67%), saya bersedia untuk bermusyarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan (64,67%) dan Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain (61,42%). Bahkan sebagian responden bersedia dalam melakukan hubungan sosial tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya (59,93%). Namun Sebagian responden tidak bersedia menikah dengan pemeluk agama lain (46,19). Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan dalam menjalin hubungan berbeda agama, khususnya pada wilayah-wilayah dengan masyarakat yang heterogen.

8. Kerjasama-Hubungan sosial Antar Umat Beragama

Kerjasama, yakni aspek hubungan sosial antara para pemeluk agama yang berbeda. Persepsi atau penilaian selain bisa mendorong lahirnya sikap juga bisa melahirkan tindakan-tindakan kerjasama. Jadi kalau sikap lebih merupakan tindakan ke dalam dalam artian belum melahirkan tindakan nyata berkaitan dengan hubungan mereka dengan pemeluk agama lain, kerjasama adalah realitas hubungan sosial. Data berikut menyajikan kerjasama responden dalam toleransi.

Tabel 3
Kerjasama Antar Umat Beragama

Kerjasama	Jawaban (% Dari Total 800 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan	12.38	39.13	32	12.63	3.88
Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain	9.25	33	40.38	15.75	1.63
Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya	13.25	29	34.13	15.13	8.50
Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain	15.75	49.50	27.63	5.88	1.25
Saya bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya	3	11.25	32.68	33.88	19.25
Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain	4.25	14.75	47.88	23.88	9.25
Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama lain	9	36.18	35	16	3.88

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kerukunan adalah kerjasama antar umat beragama/hubungan sosial. Data menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik dan sangat baik. Misalnya subvariabel bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain memperoleh nilai baik. Ini berarti dalam konteks hubungan sosial, masyarakat secara umum tidak memperlakukan identitas keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada aspek hubungan kerja dimana subvariabel saya bersedia

memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lainnya memperoleh nilai yang cukup baik. Namun pada subvariabel “bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain” sebagian besar responden menunjukkan tidak mengizinkan kegiatan keagamaan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan subvariabel “tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatannya di lingkungan tempat tinggal saya” pada dimensi sikap dimana sebagian besar responden menjawab keberatan apabila ada pembangunan tempat ibadah agama lain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ini menunjukkan bahwa adanya keengganan masyarakat untuk melibatkan diri pada kegiatan yang terkait dengan “ruang privat”.

9. Sikap Pemerintah

Penelitian ini juga menambahkan variabel sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antar umat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Tabel 4
Sikap Pemerintah Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama

Sikap Pemerintah	Jawaban (% Dari Total 801 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik	15	68.75	12.50	2.75	1

Sikap Pemerintah	Jawaban (% Dari Total 801 Responden)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik	15	62.25	19.50	2.50	0.75
Pemerintah memfasilitasi kegiatan kegiatan keagamaan dengan baik	14.50	64.13	19.38	1.75	0.25
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya	12.88	51.38	31	4.50	0.25
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	12	48.25	34.13	4.38	1.25
Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik	15	57.50	24.63	2.13	0.75
Pemerintah sering mengadakan kegiatan kegiatan yang melibatkan berbagai agama	9.88	58.88	23.25	6.50	1.50
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	39.25	48.75	10.13	1.63	0.25
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	39.88	45.75	12.25	1.88	0.25
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	43	41.75	12.75	2.13	0.38
Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama	36.25	52	8.63	2.88	0.25

Secara umum, berdasarkan jawaban responden terdapat 3 kategori utama yaitu kategori jawaban yang berada memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju menunjukkan bahwa sikap pemerintah dinilai baik dalam memelihara hubungan antar umat beragama. Adapun beberapa sikap pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik (64.13%).
 2. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (52%)
 3. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik (57.50%)
- b. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori netral pada ketiga indikator di bawah ini:
 1. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama (34.13%)
 2. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya (31%).
 3. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik (19.50%)
- c. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori tidak setuju terdapat pada indikator di bawah ini:
 1. Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik (2.75%)
 2. Pemerintah memfasilitasi kegiatan kegiatan keagamaan dengan baik (2.50%)

3. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik (1.75%)

Dari data responden di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama dan memfasilitasi dialog antar umat agama. Namun demikian pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal prosedur perijinan pembangunan rumah ibadah. Data responden yang menunjukkan netral dan tidak setuju tertinggi pada subvariabel yang terkait perijinan pendirian rumah ibadah. Kedepannya pemerintah perlu meningkatkan lagi sosialisasi berbagai kebijakan dan peraturan terkait hal tersebut.

10. Indeks Dimensi Toleransi

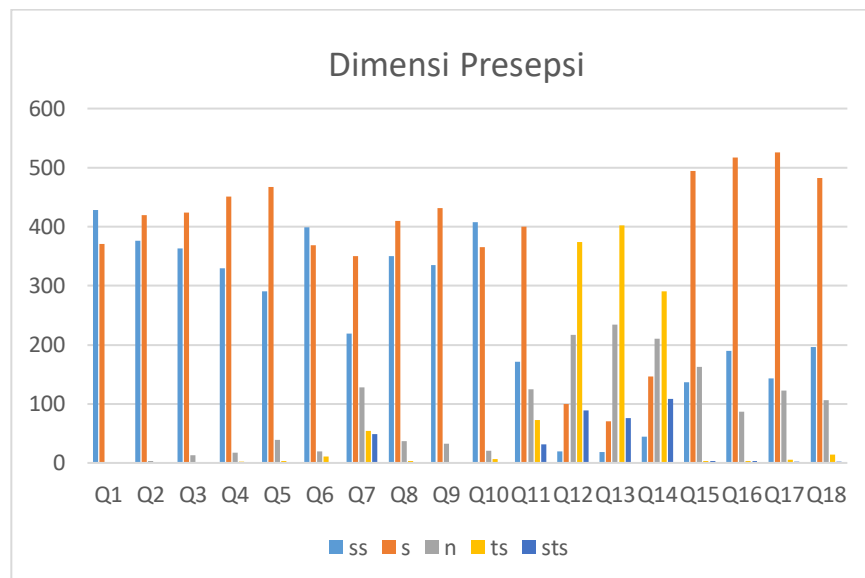
Hasil perhitungan dari masing-masing indeks dimensi berdasarkan frekuensi dan skor disajikan sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

➤ Dimensi Persepsi

Tabel 5
Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Persepsi

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q1	428	371	1	0	0	800
Q2	376	420	3	1	0	800
Q3	363	424	13	0	0	800
Q4	330	451	17	2	0	800
Q5	291	467	39	3	0	800
Q6	399	369	20	11	1	800
Q7	219	350	128	54	49	800
Q8	350	410	37	3	0	800
Q9	335	431	32	1	1	800
Q10	408	365	21	6	0	800
Q11	171	400	125	73	31	800
Q12	20	100	217	374	89	800
Q13	18	70	234	402	76	800

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q14	45	146	210	291	108	800
Q15	137	494	163	3	3	800
Q16	190	517	87	3	3	800
Q17	143	526	123	5	2	799
Q18	196	482	106	14	2	800
Frequensi	4,419	6,793	1,576	1,246	365	14,399
Skor	22,095	27,172	4,728	2,492	365	56,852
indeks dimensi persepsi						3.95

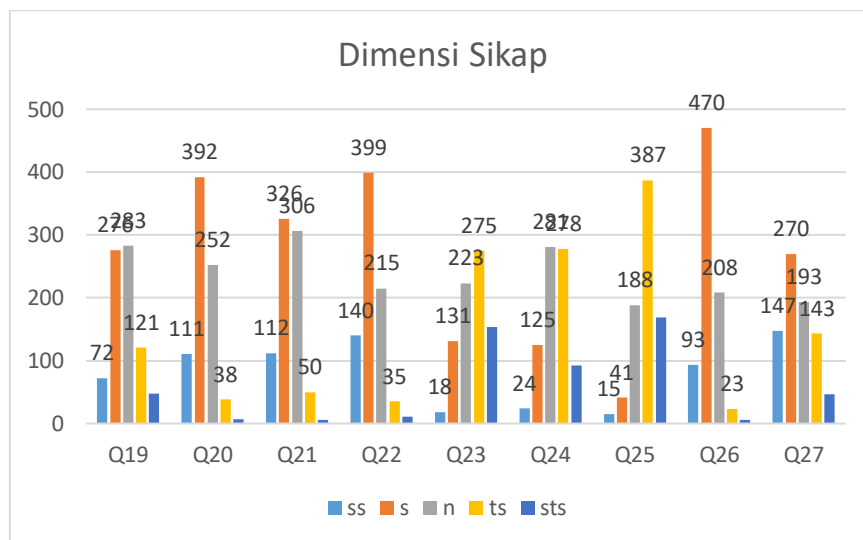


➤ Dimensi Sikap

Tabel 6
Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Sikap

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q19	72	276	283	121	48	800
Q20	111	392	252	38	7	800
Q21	112	326	306	50	6	800
Q22	140	399	215	35	11	800
Q23	18	131	223	275	153	800

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q24	24	125	281	278	92	800
Q25	15	41	188	387	169	800
Q26	93	470	208	23	6	800
Q27	147	270	193	143	47	800
Q28	732	2,430	2149	1350	539	7,200
Frequensi	3,660	9,720	6,447	2,700	539	23,066
Skor						3.20
indeks dimensi sikap	72	276	283	121	48	800



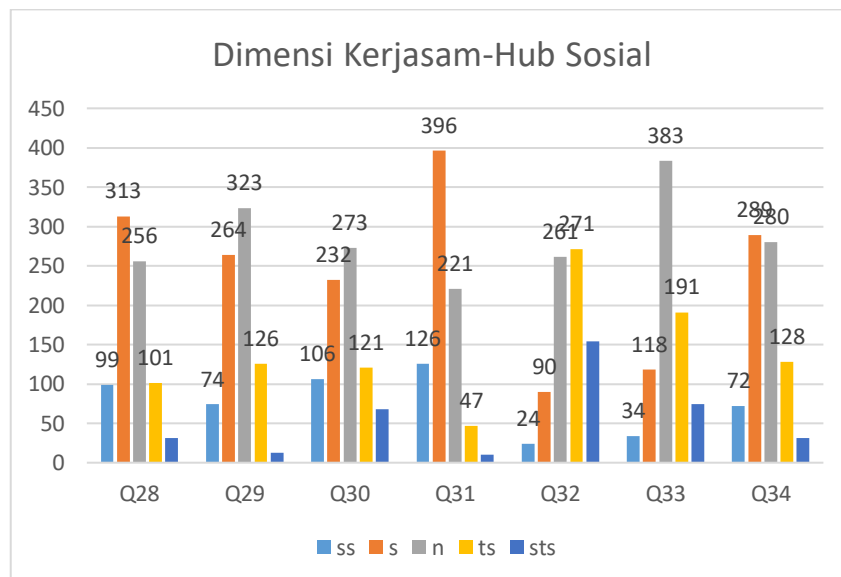
Gambar 2. Grafik Responden Dimensi Sikap

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

➤ Dimensi Kerjasama

Tabel 7
Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Kerjasama

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q29	99	313	256	101	31	800
Q30	74	264	323	126	13	800
Q31	106	232	273	121	68	800
Q32	126	396	221	47	10	800
Q33	24	90	261	271	154	800
Q34	34	118	383	191	74	800
Q35	72	289	280	128	31	800
Frequensi	535	1,702	1997	985	381	5,600
Skor	2,675	6,808	5,991	1,970	381	17,825
indeks dimensi kerjasama-hub sosial						3.18



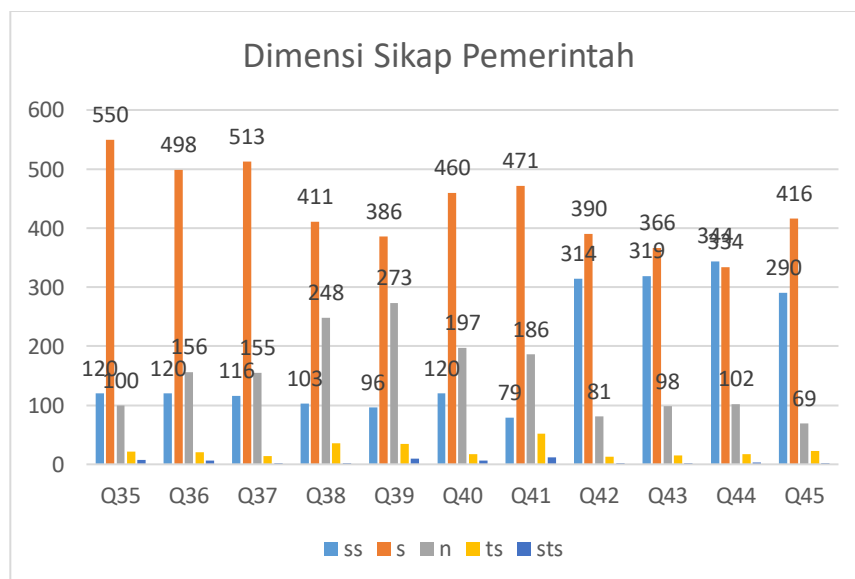
Gambar 3. Grafik Responden Dimensi Kerjasama – Hub Sosial

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

➤ Dimensi Sikap Pemerintah

Tabel 8
Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Sikap Pemerintah

No	SS	S	N	TS	STS	JUMLAH
Q36	120	550	100	22	8	800
Q37	120	498	156	20	6	800
Q38	116	513	155	14	2	800
Q39	103	411	248	36	2	800
Q40	96	386	273	35	10	800
Q41	120	460	197	17	6	800
Q42	79	471	186	52	12	800
Q43	314	390	81	13	2	800
Q44	319	366	98	15	2	800
Q45	344	334	102	17	3	800
Q46	290	416	69	23	2	800
Frekuensi	2021	4,795	1665	264	55	8,800
Skor	10,105	19,180	4,995	528	55	34,863
Indeks Dimensi Sikap Pemerintah						3.96



Gambar 4. Grafik Responden Dimesi Sikap Pemerintah

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

a. Indeks Toleransi

Dari hasil penghitungan indeks masing-masing dimensi maka dilakukan penghitungan untuk menyusun indeks komposit toleransi dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dan hasil penghitungan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9
Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019 – 2022

Uraian Capaian Indeks	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,80	Tinggi	3,91	Tinggi	3,88	Tinggi	3.95	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,27	Cukup	3,24	Cukup	3,10	Cukup	3.20	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,32	Cukup	3,34	Cukup	3,16	Cukup	3.18	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	3,88	Tinggi	4,10	Tinggi	3,93	Tinggi	3.96	Tinggi
INDEKS TOLERANSI	3,56	Tinggi	3,72	Tinggi	3,61	Tinggi	3.68	Tinggi

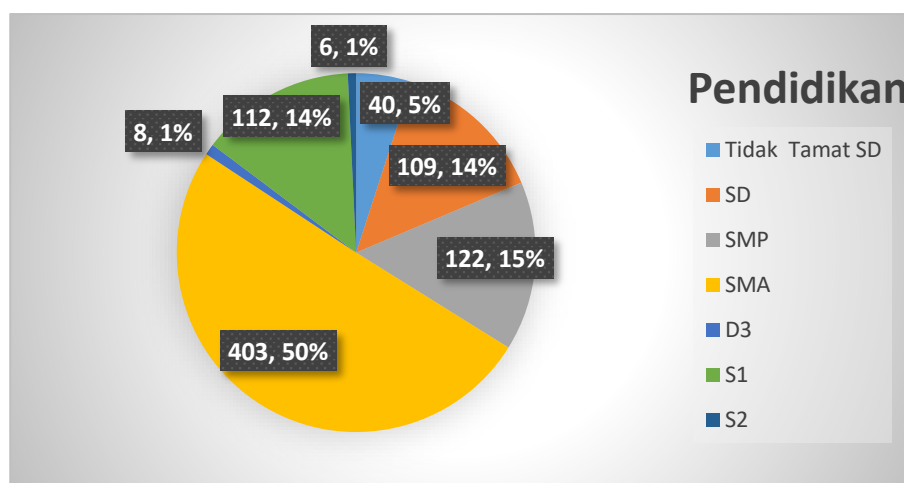
Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sebesar 3,68 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi sikap memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,20 dengan kategori cukup dan dimensi sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 3,96 dengan kategori tinggi. Nilai

tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.07 lebih tinggi dibanding dengan nilai tahun 2021.

11. Deskriptif Identitas Responden

1. Tingkat Pendidikan

Sebaran Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 5. Grafik Pendidikan responden

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

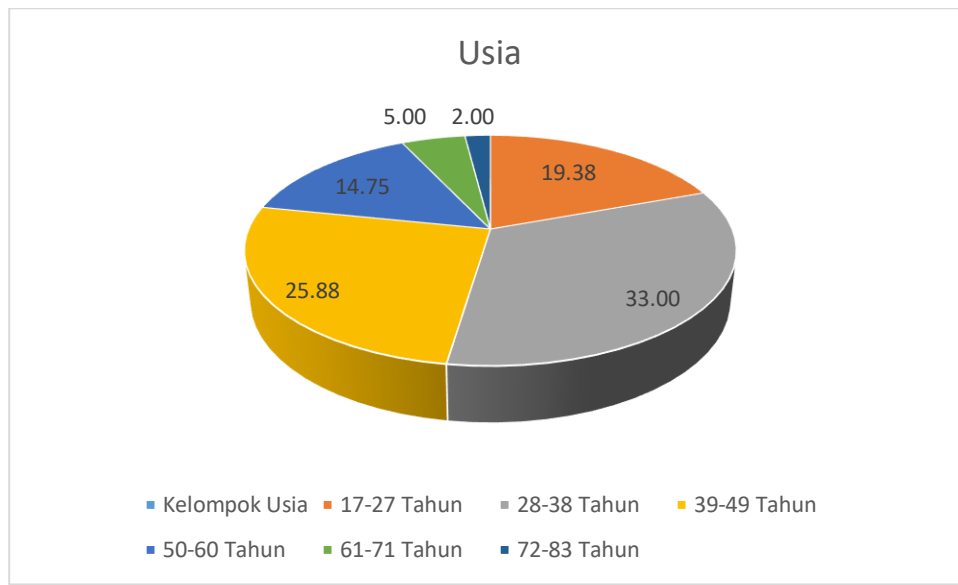
Gambar diatas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat memiliki pendidikan terakhir SMA Sederajat yaitu sebanyak 50%, kemudian disusul SMP Sederajat 15%, kemudian persentase responden yang tamat SD Sederajat dan tamat S1 sebesar 14%, persentase jumlah Pendidikan terendah pada responden dengan jenjang Pendidikan tidak tamat SD dan Diploma sebesar 1%.

Tabel 10. Nilai Korelasi Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	-0.044	-0.062	-0.049	-0.009

Tabel tersebut di atas menunjukkan karakteristik responden dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat toleransi yang selektif dan ketat, sehingga perlu dilakukan proses pembenahan terkait makna toleran di kalangan masyarakat.

2. Usia



Gambar 6. Grafik Kelompok Usia responden

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

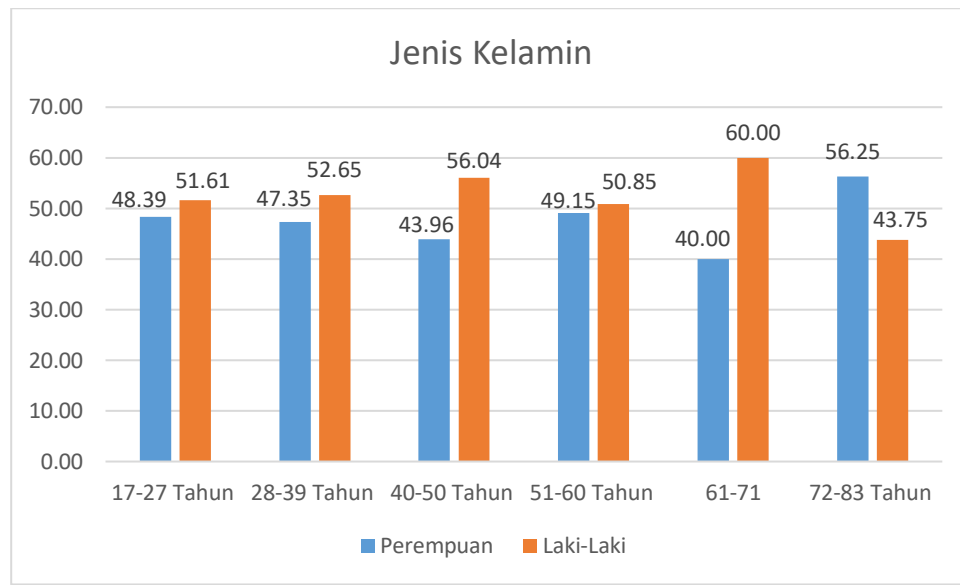
Gambar diatas menunjukkan jumlah responden usia 28-38 Tahun paling tinggi sebesar 33,00 % disusul pada usia 39-49 sebanyak 25,88 %, kemudian usia 17-27 tahun sebesar 19,38 %, usia antara 50-60 tahun sebanyak 14.75 %, persentase rentang usia responden 61-71 tahun sebesar 5% dan terakhir pada usia 72-83 Tahun sebesar 2 %.

Tabel 11. Nilai Korelasi Tingkat Usia Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	-0.025	-0.006	-0.001	-0.039

Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tua responden maka sikap toleransi terhadap persepsi, sikap, Kerjasama hubungan sosial dan sikap terhadap pemerintah semakin rendah.

3. Jenis Kelamin



Gambar 7. Grafik Kelompok Usia berdasarkan Jenis Kelamin responden

Sumber : Database penulis (Data Diolah)

Tabel diatas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun keatas laki-laki sebesar 51,61% perempuan 48,39%.

Tabel 12. Nilai Korelasi Jenis Kelamin Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	0.082	0.014	0.001	0.036

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih toleran baik dari dimensi persepsi, sikap, Kerjasama hubungan social dan sikap pemerintah dibanding dengan responden perempuan. Dimana perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan dalam mengambil suatu keputusan/pandangan/bertindak.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data serta analisa dapat disimpulkan bahwa indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dengan skor 3,68 yang termasuk dalam kategori "**Tinggi**" (3,4 – 4,1) . Hal ini menandakan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah sudah menunjukkan kondisi yang memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal. sebagaimana hasil indeks 4 (empat) dimensi/variabel yang tercantum di bawah ini :

- Dari Hasil data responden, indeks dimensi persepsi sebesar 3,95. Indeks ini menunjukkan bahwa responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kondisi ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- Pada Indeks dimensi/variabel sikap menunjukkan skor 3,20. Dimana Responden ini bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada dan bersedia bersahabat dengan pemeluk lain. Namun masih ada sebagian besar responden tidak bersedia apabila terjadi pernikahan dengan pemeluk agama lain;

- Untuk Indeks dimensi kerjasama-hubungan sosial memiliki skor 3,18. Data menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik. Misalnya sub-variabel bersedia melakukan hubungan kerja sama dengan pemeluk agama lain. Hal yang sama juga terjadi pada aspek bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lainnya yang memerlukan memperlihatkan hasil yang cukup baik. Namun pada sub-variabel “membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya” sebagian besar responden tidak bersedia untuk membantu;
- Sedangkan Indeks dimensi ke 4 (Empat) yaitu sikap pemerintah memiliki skor 3,96. Dari hasil responden memperlihatkan bahwa secara umum kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal memfasilitasi pembangunan rumah ibadah, fasilitasi dialog antar umat beragama dan melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama.
- Secara keseluruhan indeks toleransi setiap dimensi mengalami peningkatan di tahun 2022 sehingga memperlihatkan bahwa masyarakat Lombok Tengah memiliki nilai toleransi dan tingkat kerukunan antar umat beragama dilingkungan cukup baik, sehingga setiap tahunnya perlu dilakukan peningkatan untuk setiap dimensi.

2. Rekomendasi

- Pemerintah perlu berperan lebih optimal dalam hal sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan serta prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang berlaku, dan perlu lebih banyak mensosialisasikan pentingnya menjaga kerukunan didalam kehidupan bermasyarakat, dengan mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan/dianut.
- Peningkatan Penguatan sikap toleransi antar umat beragama melalui jalur pendidikan mulai dari kalangan siswa sampai Perguruan Tinggi.

- Tata kelola dengan pendekatan *collaborative governance*, yaitu kolaborasi pemerintah daerah dengan actor NGO, media sosial/masa, dan perguruan tinggi di sebut sebagai model Model *Quardruple Helix*.
- Dalam rangka meminimalkan prasangka sosial, perlu ditumbuhkan kembali nilai- nilai sosial di masyarakat, seperti gotong royong ketika perayaan hari-hari keagamaan, dan sejenisnya, sehingga ada interaksi sosial yang lebih akrab antar masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Raden Pugu Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat

KUISIONER SURVEY INDEKS TOLERANSI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

DATA RESPONDEN

NAMA	:				
JENIS KELAMIN	:				
UMUR	:			TAHUN	
PEKERJAAN	:				
ALAMAT	:				
- DUSUN / LINGKUNGAN	:				
- DESA / KELURAHAN	:				
- KECAMATAN	:				
TELAH MENETAP SECARA BERTURUT-TURUT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH SELAMA : ☐ LEBIH DARI 5 TAHUN ☐ KURANG DARI 5 TAHUN					
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	☐	1. TIDAK TAMAT SD	☐	2. SD SEDERAJAT
		☐	3. SMP SEDERAJAT	☐	4. SMA SEDERAJAT
		☐	5. DIPLOMA / S1 / S2 / S3	☐	
				☐	

DENGAN INI MENYATAKAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN SURVEY INDEKS TOLERANSI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

Tanggal Survey Bulan Tahun 2 0 2 2

Tanda Tangan Responden

DAFTAR PERTANYAAN

No	PENYATAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR*
DIMENSI PERSEPSI							
Q1	Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia						
Q2	Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masingmasing merupakan bagian dari hak asasi manusia						
Q3	Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masingasing						
Q4	Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masingmasing						
Q5	Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat						
Q6	Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain						
Q7	Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan						
Q8	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya						
Q9	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya						
Q10	Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut						
Q11	Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat bergama						

No	PENYATAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR*
Q12	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik						
Q13	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi						
Q14	Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama						
Q15	Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik						
Q16	Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama						
Q17	Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama						
Q18	Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama						
DIMENSI SIKAP							
Q19	Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain						
Q20	Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol dll) dengan pemeluk agama lain						
Q21	Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain						
Q22	Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain						
Q23	Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya						
Q24	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya						

No	PENYATAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR*
Q25	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya						
Q26	Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain						
Q27	Saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan.						
Q28	Keberadaan ajaran agama lain diluar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan						
DIMENSI KERJASAMA DAN HUBUNGAN SOSIAL							
Q29	Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan						
Q30	Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain						
Q31	Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya						
Q32	Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain						
Q33	Saya bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya						
Q34	Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain						
Q35	Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama lain						
DIMENSI SIKAP PEMERINTAH							
Q36	Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik						

No	PENYATAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR*
Q37	Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik						
Q38	Pemerintah memfasilitasi kegiatan kegiatan keagamaan dengan baik						
Q39	Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya						
Q40	Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama						
Q41	Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik						
Q42	Pemerintah sering mengadakan kegiatan kegiatan yang melibatkan berbagai agama						
Q43	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama						
Q44	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama						
Q45	Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama						
Q46	Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama						

*SS = 5 , S = 4 , N = 3 , TS = 2 , STS = 1

RAHASIA

ENUMERATOR

NAMA	:		Tanda Tangan
ALAMAT	:		

CATATAN SUPERVISOR / PENGAWAS ENUMERATOR

☐ Telah diverifikasi dan divalidasi, LAYAK / TIDAK LAYAK untuk di entri			
NAMA	:		Tanda Tangan
ALAMAT	:		

No Entri Kuisiонер

--	--	--

PETUGAS ENTRI

DIENTRI TANGGAL:			
NAMA	:		Tanda Tangan
ALAMAT	:		

UJI VALIDASI DAN REABILITAS

Item	Obs	Sign	Item-Test Correlation	Item-Rest Correlation	Average Interitem Covariance	Alpha
Q1	800	+	0.4328	0.3890	0.2019	0.9193
Q2	800	+	0.4216	0.4946	0.1997	0.9182
Q3	800	-	0.4356	0.3930	0.2019	0.9192
Q4	800	-	0.0951	0.6157	0.1996	0.9219
Q5	800	-	0.4281	0.5839	0.1957	0.9219
Q6	800	+	0.5293	0.0091	0.2100	0.9229
Q7	800	+	0.3523	0.3106	0.2036	0.9200
Q8	800	+	0.4210	0.3816	0.2021	0.9193
Q9	800	+	0.4613	0.4236	0.2017	0.9183
Q10	800	+	0.5260	0.4911	0.2036	0.9189
Q11	800	+	0.4622	0.4245	0.2090	0.9179
Q12	800	+	0.1569	0.1111	0.1978	0.9173
Q13	800	+	0.5789	0.1153	0.1976	0.9172
Q14	800	+	0.4677	0.0569	0.1969	0.9169
Q15	800	+	0.6271	0.3822	0.2021	0.9193
Q16	800	+	0.6612	0.3967	0.2018	0.9192
Q17	800	+	0.4953	0.4590	0.2005	0.9186
Q18	800	+	0.5787	0.5465	0.1987	0.9177
Q19	800	+	0.5443	0.5103	0.1994	0.9181
Q20	800	+	0.3736	0.4342	0.1987	0.9198
Q21	800	-	0.4716	0.4009	0.1994	0.9181
Q22	800	-	0.4395	0.3089	0.2092	0.9225
Q23	800	-	0.3506	0.5467	0.1998	0.2090
Q24	800	-	0.1047	0.4302	0.1989	0.2078
Q25	800	+	0.6103	0.0584	0.2031	0.9224
Q26	800	+	0.6932	0.1111	0.2010	0.9182
Q27	800	+	0.6689	0.1153	0.2017	0.9163
Q28	800	+	0.421	0.3816	0.2021	0.9193

DAFTAR KUISIONER INDEKS TOLERANSI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

No. Questioner	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat	Pendidikan	Dimensi Persepsi																		Dimensi Sikap							Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial							Dimensi Sikap Pemerintah											
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44
1	1	46	Petani	Embung Wile	SMA	5	5	5	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	4	4	3	3	4	3	5	5	5	5
2	2	57	IRT	Lingkok Binui	SD	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	3	3	3	1	1	1	4	4	3	3	4	4	1	1	2	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
3	1	62	Petani	Lingkok Binui	Tidak Tamat	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	2	2	2	4	4	4	3	4	3	2	2	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4
4	2	42	IRT	Lingkok Binui	SMA	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4																												

237	1	33	Buruh harian le	Mas-mas	SMA	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	1	1	1	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	4	3	2	4	3	3	2	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	
238	1	24	Tidak bekerja	Mas-mas	SMA	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	1	1	1	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	5	5
239	1	44	Buruh harian le	Aik Bukak	SMA	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	1	1	1	4	5	5	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	3	2	4	2	2	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	
240	1	23	Mahasiswa	Punikasi	S1	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	1	1	1	4	5	5	5	3	4	4	4	3	2	2	4	4	3	2	5	3	3	2	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5			
241	2	19	Tidak bekerja	Seganteng	SMA	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	5	2	2	4	5	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4		
242	2	43	IRT	Bujak	SMA	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	4	2	2	2	4																				

297	1	51	Petani	Arjanka Utara	SD	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	2	2	3	5	5	1	2	1	3	2	4	4	5	4	3	2	3	5	3	3	3	4	2
298	1	37	Wiraswasta	Puspapaya	S1	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	2	1	3	5	4	5	4	4	4	3	4	3	2	4	1	2	5	3	1	4	3	2	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5
299	1	40	Wiraswasta	Puspapaya	SMP	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	5	2	2	3	2	1	1	2	4	3	2	3	5	4	2	1	1	5	4	5	4	3	3	2	4	4	4	3
300	1	28	Karyawan swas	arjanka selatan	S1	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	1	1	3	3	3	2	2	3	1	1	4	5	4	4	5	2	2	3	1	5	5	4	5	
301	2	38	Karyawan swas	Puspapaya	S1	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	2	2	1	3	5	4	5	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	4	2	4	4	2	3	2	2	3	5	4	4	4	4	5	2	
302	2	32	IRT	Kubur Jalan	SMA	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	2	2	1	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	4																				

487	1	30	Mahasiswa	Landah	S1	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	2	1	3	5	4	5	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2	3	2	4	2	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	5	3	3	
488	1	42	Petani	Landah	SD	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	2	2	4	4	4	5	2	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	2	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	5	3	3
489	1	21	Mahasiswa	Landah	SMA	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	4	2	2	3	2	4	2	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	5	3	3	
490	1	23	Karyawan Swa	Landah	SMA	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	3	2	1	4	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	3	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	
491	1	35	Karyawan Swa	Marong	SMA	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	1	2	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	4	2	3	3	2	4	2	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
492	2	45	Petani	Nyampe	SD	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4																																				

555	2	27	IRT	Kerajak	S1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5	3	4	1	5	5	5	5	5	5	2	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
556	2	40	Guru	Sasake	S1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	2	3	5	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5
557	2	32	IRT	Sasake	SMA	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	1	4	5	5	5	5	5	2	4	4	3	3	3	3	3	4	5	5	5	4	
558	1	57	Wirawasta	Sasake	SMA	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	
559	1	31	Sopir	Sasake	SMA	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	2	2	4	4	3	4	4	5	4	5	2	2	1	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5		
560	2	54	Pedagang	Jontlak	Tidak Tamat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	3	3																												

623	1	44	Petani	Tanak Beak	SD	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	2	2	2	4	4	3	4	2	3	3	4	2	2	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
624	1	355	Karyawan Swas	Ungga	SMA	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
625	1	54	Petani	Ungga	SMP	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	2	2	2	4	3	3	4	3	3	4	2	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
626	1	38	Guru	Ungga	S1	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	2	2	2	4	4	4	4	3	4	5	3	3	2	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
627	1	31	Wiraswasta	Ungga	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
628	1	37	Karyawan Swas	Ungga	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	5																																				

691	1	37	Petani	Repek Puyung	SMA	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	2	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	1	5	5	5	5	5	2	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
692	2	23	Pegawai swast	Penakak	S1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	1	1	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	1	5	1	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	3	3	5
693	1	38	Honoror	Mantang	S1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
694	1	45	Wiraswasta	Mantang	SMP	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
695	1	77	Buruh tani	Sandik	Tidak Tamat	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	1	1	1	4	5	4	4	5	5	5	4	4	1	5	1	5	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5			

